

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PELAKSANA *4<sup>th</sup> INDONESIA PROCUREMENT FORUM AND EXPO (IPFE)*  
2018 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan *4<sup>th</sup> Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE)* 2018 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Tim Pelaksana Kegiatan *4<sup>th</sup> Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE)* 2018 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Kegiatan *4<sup>th</sup> Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE)* 2018 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA *4<sup>th</sup> INDONESIA PROCUREMENT FORUM AND EXPO (IPFE) 2018* LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan *4<sup>th</sup> Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE) 2018* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan *4<sup>th</sup> Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE) 2018* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- menyusun dan merencanakan pelaksanaan *4<sup>th</sup> Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE) 2018* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - melaksanakan kegiatan Festival / Pameran pada tanggal 24-26 Juli 2018; dan
  - Melaporkan pelaksanaan kegiatan *4<sup>th</sup> Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE) 2018* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KEEMPAT : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Kegiatan *4<sup>th</sup> Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE) 2018* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya Kegiatan *4<sup>th</sup> Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE) 2018*.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 23 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA



		25. Abdollah Hasibuan	300.000
		26. Meita Damayanti	300.000
		27. Richky Usman	300.000
		28. Dian Arsita	300.000
		29. Anas Bayu Kusuma	300.000
		30. Hendra Damendra N.	300.000
		31. Inamawati Mastuti Dewi	300.000

Plt. SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA